

**STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN RUMPUT
LAUT DI KECAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG**

*STRATEGY OF AREA DEVELOPMENT MINAPOLITAN SEA GRASS
IN PAJUKUKANG SUBDISTRICT BANTAENG REGENCY*

**IKHSAN S
P0200210001**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN RUMPUT
LAUT DI KECAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

IKHSAN S

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

LEMBAR PENGESAHAN
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
RUMPUT LAUT DI KECAMATAN PAJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG

Disusun dan Diajukan Oleh

IKHSAN S
Nomor Pokok P0200210001

Menyetujui
Komisi Penasehat,

Dr. Ir. Roland A. Barkey
Ketua

Dr. A. Adri Arief, S.Pi, M.Si
Anggota

Ketua Program studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah

Dr. Ir. Roland A. Barkey

PRAKATA



Katakanlah : “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Az-Zumar:9)

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Subhana Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu Segala-galanya, Tuhan yang Maha Memberi Ilmu yang baik, Tuhan Yang Maha Kaya, Tuhan Yang Wajib di Sembah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, telah memberikan limpahan Karunia dan Berqah berupa nikmat dan kesehatan, sehingga penulis dapat menempuh studi di Program Studi Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin dan menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagaimana diharapkan. Penulis juga tidak lupa mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang telah memberikan pencerahan kepada seluruh umat manusia di bumi.

Banyak kendala yang Penulis hadapi selama penyusunan Tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka Tesis ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada Dr. Ir. Roland A. Barkey sebagai ketua komisi penasehat dan Dr. A. Adri Arief, S.Pi, M.Si sebagai anggota komisi penasehat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis

sampaikan kepada : Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU, Prof. Dr.Ir.Rahman Mappangaja, MS dan Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS selaku penguji, yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengujian dan masukan yang bermanfaat untuk kelengkapan tesis ini.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya haturkan kepada jajaran PEMDA Kabupaten Bantaeng terutama Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah banyak membantu dalam rangka pengumpulan data dan informasi, terima kasih juga penulis haturkan kepada kawan-kawan di Magister PPW angkatan 2010 Universitas Hasanuddin yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian study.

Limpahan hormat kepada yang tercinta Ayahanda Suleman R, S.Pd dan Ibunda Muttiara, S.Pd, serta kepada kakak dan adik-adikku (Irham S,A.Md, Ichal Try Samsul dan Indra Kurniawan) yang berkat bisikan doanya senantiasa menuntun perjalanan hidup penulis. Semoga Allah SWT mengasihani mereka sebagaimana mereka mengasihani penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua stakeholder olehnya itu masukan, arahan dan kritikan yang membangun sangat diharap kann guna perbaikan kedepan.

Makassar, Maret 2013

Penulis

ABSTRAK

IKHSAN S. *Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Rumput Laut di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng* (dibimbing oleh Roland A. Barkey dan A. Adri Arief).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan minapolitan rumput laut di Kecamatan Pajukukang dan (2) Merumuskan opsi strategi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan rumput laut di Kecamatan Pajukukang.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survey lapangan dengan mewancarai sejumlah informan dan studi literature. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*) untuk menentukan strategi melalui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di kawasan minapolitan rumput laut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya dukung lahan, sumberdaya manusia, aspek teknis budidaya serta infrastruktur kelautan dan pesisir merupakan faktor-faktor yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan rumput laut. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah serta infrastruktur kelautan dan pesisir kurang tersedia bagi pengembangan kawasan minapolitan rumput laut, olehnya itu diperlukan strategi pengembangan kawasan minapolitan rumput laut di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng untuk mengatasi hal tersebut. Hasil dari analisis strategi tersebut menunjukkan bahwa kota perikanan dengan komoditi utama rumput laut sebagai kluster kegiatan perikanan yang meliputi produksi, pengolahan dan pemasaran dalam sistem agribisnis terpadu di Kecamatan Pajukukang dapat diwujudkan dengan pengembangan kawasan minapolitan rumput laut.

Kata Kunci : rumput laut, agribisnis, infrastruktur.

ABSTRACT

IKHSAN S. *Strategy Of Area Development Minapolitan Sea Grass In Pajukukang Subdistrict Bantaeng Regency* (supervised by Roland A. Barkey and A. Adri Arief)

This Research aims to (1) Supporting factors analysis that have an effect on to area development minapolitan sea grass in Pajukukang Subdistrict and (2) Formulate opdon of development policy strategy area minapolitan sea grass in Pajukukang Subdistrict.

This Research is executed in region Pajukukang Subdistrict Bantaeng Regency. Method as used in research is field survey with interview a number of informan and studies literature. Data that gathered then analysed by using analysis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) to determine strategy pass by strength, weakness, opportunity and threat that exist in area minapolitan sea grass.

Result of this research indicates that farm support capability, human resources, technical aspect conducting and oceaninc infrastructure and coastal area is development supportive factors area minapolitan sea grass. Nevertheless fact at the site indicate that quality of human resources that still low and oceaninc infrastructure and coastal area less available for area development minapolitan sea grass, in consequence are needed strategy of area development minapolitan sea grass in Pajukukang Subdistrict Bantaeng Regency by using matrix analysis SWOT. The result of strategy analysis are referred indicate that fishery city with main commodity sea grass as kluster fishery activity that cover production, processing and marketing in integrated agribusiness system in Pajukukang Subdistrict can be realized with area development minapolitan sea grass.

Keyword: sea grass,agribisms,infrastructure.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikhsan S
NIM : P0200210001
Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2013

Yang membuat pernyataan,

Ikhsan S

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir secara terpadu	11
B. Strategi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Indonesia	15
C. Pengelolaan Wilayah Pesisir	21

	10
D. Budidaya Rumput Laut	23
1. Deskripsi <i>Kappaphycus alvarezii</i>	24
2. Persyaratan Lokasi Budidaya	25
3. Kelayakan Lingkungan dan Kualitas Perairan	27
4. Tahapan Budidaya Rumput Laut	30
E. Konsep Revolusi Biru	32
F. Konsep Minapolitan	34
1. Pengertian Umum	36
2. Kriteria Kawasan Minapolitan	37
3. Persyaratan Kawasan Minapolitan	38
4. Komoditi Unggulan Kawasan Minapolitan	41
G. Kerangka Pikir	44
 BAB III	
METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Desain Penelitian	47
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
C. Metode Pengumpulan Data	49
D. Populasi dan Pengambilan Informan	51
E. Teknik Analisis Data	52
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	56
1. Kondisi Geografis dan Administratif	56
2. Kondisi Sumberdaya Manusia	57
B. Ketersediaan dan Daya Dukung Lahan	61
1. Penggunaan Lahan Budidaya Rumput Laut	61
2. Kesesuaian Lahan untuk Peruntukan Kegiatan Budidaya Rumput Laut	63
3. Kondisi Iklim	64
4. Pasang Surut	66

	11
C. Aspek Teknis Budidaya Rumput Laut	66
1. Proses Budidaya Rumput Laut	66
2. Produksi dan Produktivitas Rumput Laut	71
D. Infrastruktur Pendukung Kawasan Minapolitan	73
1. Sarana Industri Pengolahan Hasil	73
2. Sarana Pemasaran	75
3. Pariwisata	77
4. Sarana dan Prasarana Jalan	78
5. Jaringan Listrik	80
6. Sarana Komunikasi	82
7. Jaringan Sumberdaya Air	84
8. Sentra Kegiatan Perikanan	85
E. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Rumput Laut	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Matriks SWOT	55
2.	Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng	57
3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Pajukukang Menurut Tingkat Pendidikan.	58
4.	Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan Pajukukang tahun 2011	59
5.	Kondisi angkatan kerja Kecamatan Pa'jukukang berdasarkan pembagian penduduk usia kerja dan bukan angkatan kerja Pada Tahun 2011	60
6.	Luas Lahan Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Pajukukang	61
7.	Jumlah produksi rumput laut di Kecamatan Pajukukang tahun 2011	71
8.	Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kewenangannya di Kabupaten Bantaeng dari Tahun 2006-2011	79
9.	Perkembangan Kondisi Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bantaeng dari Tahun 2006-2011	80
10.	Jumlah Sarana Komunikasi Dirinci Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pa'jukukang Pada Tahun 2011	82
11.	Hasil pengklasifikasian data internal dan eksternal	88
12.	Hasil pengklasifikasian faktor internal	89
13.	Hasil pengklasifikasian faktor eksternal	90
14.	Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	91

15. Hasil pemberian bobot dan skala rating faktor internal 93
16. Hasil pemberian bobot dan skala rating faktor eksternal 94
17. Matriks strategi pengembangan kawasan minapolitan rumput laut di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng tahun 2012. 96

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	<i>Kappaphycus alvarezii</i>	25
2.	Kerangka Pikir Penelitian Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Rumput Laut di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng	46
3.	Peta Lokasi Penelitian	48
4.	Produk-Produk Hasil Pengolahan Rumput Laut Yang Diusahakan Salah Satu UKM di Kecamatan Bantaeng	74
5.	Lokasi Wisata Pantai Marina	78
6.	Kondisi dan Aktivitas Kegiatan Nelayan di Pelabuhan TPI Birea Kecamatan Pa'jukukang	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya alam pesisir dan laut, dewasa ini sudah semakin disadari banyak orang bahwa sumberdaya ini merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Di sisi lain, konsekuensi logis dari sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama (common property) dan terbuka untuk umum (open acces) maka pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dewasa ini semakin meningkat di hampir semua wilayah. Pemanfaatan yang demikian cenderung melebihi daya dukung sumberdaya (over exploitation).

Perubahan mendasar cara berpikir dari daratan ke maritim yang dikenal dengan "Revolusi Biru", telah mengubah orientasi pembangunan yang sebelumnya hanya terkonsentrasi pada wilayah daratan telah meluas pada pembangunan wilayah maritim yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu realisasi dari program revolusi biru yang digalakkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) adalah program pengembangan Minapolitan, yang merupakan konsep pembangunan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak disektor kelautan dan perikanan.

Sistem manajemen kawasan Minapolitan didasarkan pada prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi. Program yang mulai dijalankan Pemerintah RI sejak 2009 merupakan upaya untuk merevitalisasi sentra produksi perikanan dan kelautan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan rakyat. Melalui program ini, tidak semua komoditas akan dikembangkan melainkan hanya akan memprioritaskan pada komoditas yang telah unggul (Kepmen Pedum Minapolitan, 2011).

Revolusi Biru diharapkan dapat melakukan perubahan yang signifikan dengan mengangkat konsi pembangunan berkelanjutan dengan Program Nasional Minapolitan yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas. Revolusi Biru mempunyai empat pilar penting antar lain, perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim, pembangunan berkelanjutan, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, dan terakhir peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas.

Pada tingkat implementasi, Revolusi Biru akan dilaksanakan melalui sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah menggunakan konsep Minapolitan. Minapolitan sendiri berasal dari kata mina berarti ikan dan politan berarti polis atau kota, sehingga secara bebas dapat diartikan sebagai kota perikanan. Pengembangan konsep dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota (Sunoto, 2010).

Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang pada umumnya berada di daerah pedesaan lambat berkembang karena kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya manusia juga relatif rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia di daerah perkotaan. Kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di daerah perkotaan.

Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2008-2028 telah menekankan bahwa pembangunan disesuaikan dengan potensi spesifik yang dimiliki, dalam hal ini termasuk aspek sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan diarahkan berbasis wilayah desa, kabupaten dan kota, serta tatanan fungsional dalam bentuk lembaga kemasyarakatan secara mandiri.

Pada kenyataannya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 bahwa sub sektor kelautan dan perikanan belum dapat dipisahkan dari sektor pertanian dengan posisi rasio merupakan yang terkecil (7,75%), sedangkan industri pengolahan menempati yang terbesar (46,42%). Padahal sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB (31,0%), sekalipun outputnya berada di bawah industri pengolahan yang menyumbang (20,06%) dari output total. Dengan demikian sehingga rencana pembangunan Kawasan Minapolitan

di Kabupaten Bantaeng sebagai bagian kumulatif potensi ekonomi yang berpeluang untuk menumbuhkan perekonomian daerah.

Mengingat bahwa pembangunan dan pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bantaeng juga termasuk industri pengolahan hasil tangkapan dan budidaya perikanan dan kelautan, maka pengembangan sektor industri pengolahan merupakan alternatif terbaik bagi terjaminnya pertumbuhan perekonomian Sulawesi Selatan. Demikian pula produk industri pengolahan kelautan dan perikanan merupakan komoditas perdagangan dan jasa merupakan sektor ketiga terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan hirarkis Bantaeng sebagai Pusat Kegiatan Lokal untuk sektor industri, perdagangan dan jasa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008 – 2013 yang terkait dengan pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bantaeng adalah : Revitalisasi dan restrukturisasi Kawasan Andalan di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi upaya-upaya untuk mentransformasikan potensi spesifik yang dimiliki menjadi keunggulan lokal dari kawasan. Sedangkan restrukturisasi ditekankan kepada peningkatan interkoneksi antar Kawasan Andalan yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya sinergi antar komoditas dan pelaku pembangunan pada masing-masing kawasan.

Kegiatan pada setiap kawasan andalan yang berbasis pertanian (termasuk perikanan dan kelautan didalamnya), penerapan prinsip-prinsip agrobisnis/ minabisnis, agar mampu menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi di pasar lokal, nasional, atau bahkan di pasar global. Sektor perikanan dan kelautan sebagai bagian utama dalam sektor pertanian secara menyeluruh menjadi fokus untuk dijadikan pemicu peningkatan produksi andalan Provinsi Sulawesi Selatan.

Di dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng telah dirumuskan program-program pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten Bantaeng pada setiap 5 (lima) tahunnya, melalui visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan umum daerah Kabupaten Bantaeng Periode 2008-2013, yaitu “Wilayah Terkemuka Berbasis Desa Mandiri “.

Visi ini sekaligus menunjukkan strategi dasar pembangunan yang dianut, yaitu mengedepankan upaya-upaya pembangunan untuk mendorong tumbuh-kembangnya desa-desa di Bantaeng menjadi Desa Mandiri, sebagai perwujudan dari upaya untuk pemenuhan hak dasar masyarakat yang merupakan strategis dasar pembangunan daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bantaeng merupakan daerah dengan peluang pengembangan kawasan minapolitan yang sangat potensial dengan komoditi unggulan di bidang rumput laut yang cukup besar, hal itu dapat dilihat dari lahan komoditi rumput laut sekitar 170 ha yang tersebar di tiga

kecamatan, yaitu Kecamatan Bisappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Pa'jukukang (Departemen Perikanan dan Kelautan, 2010).

Secara geografis, wilayah Kecamatan Pa'jukukang terletak diantara $120^{\circ} 02' 19''$ BT dan $05^{\circ} 30' 01''$ LS dengan luas wilayah 48,90 km² atau 12,35 % dari luas wilayah Kabupaten Bantaeng. Kecamatan Pa'jukukang merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya adalah wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Bantaeng. Kecamatan Pa'jukukang ini terdiri atas 10 (sepuluh) desa/kelurahan dan ada 7 (tujuh) desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir pantai meliputi; desa/kelurahan ; Rappoa, Lumpangan, Biangkeke, Pa'jukukang, Borong Loe, Papan Loe dan Baruga.

Budidaya rumput laut di Kecamatan Pajukukang mulai digeluti pada tahun 1987 dan masih diminati sampai sekarang, bahkan dalam perkembangan terakhir telah menjadi primadona bagi aktivitas mata pencaharian masyarakat pesisir di Kecamatan Pajukukang. Fenomena ini tertampilkan melalui banyaknya nelayan tangkap yang beralih menjadi petani rumput laut bahkan menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Dengan alasan yang sederhana bahwa budidaya rumput laut memiliki masa tanam yang pendek dan memiliki nilai jual yang tinggi. Hal tersebut menimbulkan suatu kekhawatiran bahwa pada saat kelak kegiatan rumput laut menunjukkan tingkat kejenuhannya, akan cukup menyulitkan bagi warga nelayan yang telah meninggalkan aktivitasnya.

Dari segi ekonomi, telah ada beberapa usaha masyarakat setempat yang mencoba mengolah rumput laut menjadi produk Industri Rumah Tangga yang dilakukan oleh koperasi usaha kecil dan menengah dalam skala rumah tangga, berupa berbagai jenis kue, dan makanan kecil dari rumput laut serta Berbagai jenis minuman semacam sirup, jus rumput laut (minuman sehat). Namun masih mengalami permasalahan-permasalahan, yaitu ; Dari sisi harga belum mampu bersaing dengan produk sejenis yang bahan bakunya non rumput laut, tenaga kerja dengan keterampilannya yang tidak/belum memadai, teknologi yang sederhana serta modal investasi yang kecil.

Mengacu pada Konseptual Minapolitan yang mempunyai dua unsur utama yaitu, Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Maka, Konsep Minapolitan rumput laut di Kabupaten Bantaeng dapat didefinisikan sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi dan kualitas serta akselerasi tinggi. Oleh karena itu, Kawasan Minapolitan diharapkan menjadi kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi rumput laut, industri rumput laut, perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait.

Dengan konsep Minapolitan rumput laut pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan atau peluang yang biasanya ada di daerah perkotaan, diharapkan dapat dikembangkan di Kabupaten Banteng, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi, serta berkembangnya pengolahan hasil produksi skala home industri. Sebagai sentra produksi, Kecamatan Pajukukang diharapkan dapat berkembang sebagaimana daerah perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

Oleh karena itu, minapolitan rumput laut berbasis pengembangan wilayah harus dilakukan dengan memperhatikan potensi dan daya dukung, peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau sumberdaya laut di Kecamatan Pajukukang secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka perlu dilakukan analisis atau kajian yang mendalam tentang bagaimana strategi pengembangan Kawasan Minapolitan Rumput Laut di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan minapolitan rumput laut di Kecamatan Pajukukang.
2. Bagaimanakah strategi pengembangan kawasan minapolitan rumput laut di Kecamatan Pajukukang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan minapolitan rumput laut di Kecamatan Pajukukang.
2. Merumuskan usulan strategi pengembangan kawasan minapolitan rumput laut di Kecamatan Pajukukang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan, kalangan swasta dan usahawan dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan rumput laut di Kecamatan Pajukukang.

2. Bagi masyarakat dan stakeholder lainnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi bagi pengembangan usaha agribisnis di Kabupaten Bantaeng.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam lingkup kajian dan penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Pengelolaan adalah suatu upaya agar suatu perairan tetap memiliki fungsi/kemampuan memproduksi secara berkelanjutan secara alami maupun melalui pemanfaatan. Sedangkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007).

Dahuri (2001) mendefinisikan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu sebagai suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi, yaitu: sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Untuk mengelola wilayah pesisir sangat diperlukan batas wilayah yang akan dikelola. Batas wilayah dipertimbangkan atas dasar biogeofisik kawasan didalamnya termasuk faktor hidrologi, ekologis,

maupun administratif. Batas hidrologi dibutuhkan karena aliran air yang berasal dari daratan akan mempengaruhi kawasan perairan. Batas ekologis diperlukan agar dalam pengelolaan wilayah pesisir tidak memotong siklus hewan perairan, sedangkan batas administratif dibutuhkan agar daerah yang terkena peraturan dapat diketahui dengan jelas.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, didefinisikan oleh Cicin-Sain dan Knecht (1998), sebagai suatu proses dinamis dan kontinu dalam membuat keputusan untuk pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan kawasan pesisir dan lautan beserta sumberdaya alamnya secara berkelanjutan. Jadi pada dasarnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah bertujuan agar pemanfaatan sumberdaya bisa berkelanjutan, yakni pemanfaatan (pembangunan) yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Secara ringkas Munasinghe (2002) menyatakan bahwa Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keserasian antara laju kegiatan pembangunan dengan daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan alam, untuk menjamin tersedianya aset sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang minimal sama untuk generasi mendatang (Bengen 2002). Atau Pembangunan berkelanjutan

adalah perubahan sosioekonomi secara positif yang tidak merusak atau mengurangi sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung (Rees 1988 *dalam* Charles 2001). Pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan pembangunan pesisir dan lautan secara teknis didefinisikan sebagai berikut: Suatu upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan untuk kesejahteraan manusia (terutama *stakeholders*) sedemikian rupa, sehingga laju (tingkat) pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan termaksud tidak melebihi daya dukung (*carrying capacity*) kawasan pesisir dan lautan untuk menyediakannya (Dahuri 2001).

Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga komponen utama yang sangat diperhitungkan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Setiap komponen tersebut saling berhubungan dalam satu sistem yang dipicu oleh kekuatan dan tujuan. Sektor ekonomi untuk melihat pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan konsumsi barang-barang dan jasa pelayanan. Sektor lingkungan difokuskan pada perlindungan integritas sistem ekologi. Sedangkan sektor sosial bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar manusia, pencapaian aspirasi individu dan kelompok, dan penguatan nilai serta institusi (Munasinghe 2002). Budiharsono (2006) juga berpendapat sama, bahwa pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi penting, yakni ekonomi, sosial (budaya), dan lingkungan. Dimensi ekonomi, antara lain

berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta mengubah pola produksi dan konsumsi ke arah yang lebih seimbang. Dimensi sosial bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Adapun dimensi lingkungan, diantaranya mengenai upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi, pengelolaan limbah, serta konservasi/preservasi sumberdaya alam. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada ke tiga dimensi yaitu, keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (*social progress*), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*). Sangat sesuai dengan pendapat Bengen (2002) bahwa dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan merupakan tiga dimensi yang harus seimbang dalam pembangunan berkelanjutan.

Begen (2002) menyatakan bahwa, selain memiliki potensi sumberdaya yang besar, wilayah pesisir juga memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Kompleksitas yang dimaksud adalah 1) penentuan wilayah pesisir baik ke arah darat maupun ke arah laut sangat bervariasi tergantung karakteristik lokal kawasan tersebut; 2) adanya keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan kawasan lahan atas dan laut lepas; 3) memiliki berbagai jenis sumberdaya dan jasa lingkungan,

sehingga menghadirkan berbagai penggunaan/pemanfaatan sumberdaya pesisir yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor pembangunan; 4) secara sosial ekonomi, wilayah pesisir biasa dihuni oleh lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki preferensi yang berbeda; 5) adanya sifat *common property* dari sumberdaya pesisir yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap sumberdaya tersebut; dan 6) sistem sosial budaya masyarakat pesisir memiliki ketergantungan terhadap fenomena alam. Karena kompleksitas permasalahan di wilayah pesisir cukup tinggi, maka alternatif yang sesuai untuk pengelolaannya adalah pengelolaan secara terpadu. Sebaliknya pengelolaan secara sektoral hanya akan memperbesar ancaman terhadap kelangsungan sumberdaya pesisir dan laut. Berkaitan dengan pengembangan rumput laut di wilayah pesisir, maka pengelolaan yang dilaksanakan harus terpadu dengan sektor-sektor lain agar tidak saling mematikan sehingga pengembangan rumput laut dapat berkelanjutan dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan.

B. Strategi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Indonesia

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi semakin penting, jika membandingkan kesuksesan beberapa negara dalam pembangunan sektor tersebut seperti Islandia, Norwegia, Thailand, dan Korea Selatan. Berdasarkan pengalaman pembangunan kelautan dan perikanan di beberapa negara tersebut, bangsa Indonesia sepatutnya

optimis bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan sumber daya kelautan dan perikanan yang demikian besar menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai "*prime mover*" pembangunan ekonomi nasional. Dengan kata lain sudah seharusnya sektor kelautan dan perikanan dijadikan arus utama (*main stream*) pembangunan nasional (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006)

Berkaitan dengan hal itu, Departemen Kelautan dan Perikanan perlu merumuskan strategi pembangunan yang tepat sesuai dengan tiga pilar strategi pembangunan nasional yakni *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-growth*. Selain itu, perlu disusun kebijakan dan strategi yang *pro-bussiness*. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan bagian dari proses perencanaan strategis yaitu:

- a. Modal dasar mencakup potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peraturan perundangan.
- b. Tantangan dan masalah yang masih dihadapi hingga saat ini.
- c. Instrument input.
- d. Lingkungan strategis (global dan regional).

Keempat aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan strategi, juga untuk menetapkan visi, dan misi serta kebijakan

operasional departemen dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006).

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mencapai daya saing yang tinggi. Implementasi kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan meliputi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Departemen Kelautan dan Perikanan (2006) menyatakan bahwa di bidang sosial, arah dan kebijakan pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan diorientasikan kepada :

1. Meluasnya Pemerataan

Orientasi pembangunan kelautan dan perikanan selama 5 tahun terakhir mampu memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui distribusi dan alokasi anggaran ke kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kegiatan berbasis masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di daerah telah menunjukkan peningkatan dalam pemerataan dan perluasan cakupan area pembangunan. Pembangunan telah dilaksanakan di kabupaten/ kota di wilayah pesisir dan kabupaten/kota pedalaman yang potensial untuk budidaya air tawar, serta secara bertahap di pulau-pulau kecil.

Cakupan program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir meningkat dari tahun ke tahun.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat tersebut dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, serta pulau-pulau kecil yang berpenduduk miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- b. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil.
- c. Pengembangan intensifikasi budidaya udang, kerapu, rumput laut, dan nila.
- d. Pemberdayaan perempuan dan generasi muda.
- e. Pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil dan di wilayah perbatasan.

2. Meningkatnya Kepedulian Masyarakat

Langkah-langkah sistematis dan terarah yang telah ditempuh dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, telah mendorong partisipasi masyarakat dan menunjukkan peningkatan kepedulian masyarakat luas (nelayan, pembudidaya ikan, LSM, perguruan tinggi, media massa, dan kelompok masyarakat lainnya) terhadap sektor kelautan dan perikanan.

Kepedulian ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di berbagai media massa dan kepedulian dalam proses pembangunan secara keseluruhan.

Departemen Kelautan dan Perikanan (2006) menegaskan bahwa di bidang ekonomi, arah dan kebijakan pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan diorientasikan kepada :

3. Meningkatnya Pertumbuhan

Sumber daya pesisir dan lautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik jenis maupun potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan *OTEC* (*Ocean Thermal Energy Conversion*), dan energi yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya.

Dalam situasi perekonomian Indonesia yang sedang tidak stabil sebagai dampak krisis global, sektor perikanan khususnya perikanan budidaya merupakan tumpuan harapan pemerintah yang dapat diandalkan. Sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki dan seiring dengan tantangan global, maka visi pembangunan perikanan budidaya adalah “Mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi andalan, yang dilaksanakan melalui sistem usaha perikanan budidaya rumput laut yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan”.

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (2002), bahwa tujuan dan sasaran strategi pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya rumput laut.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan produktivitas usaha budidaya rumput laut untuk penyediaan bahan baku industri perikanan dalam negeri, meningkatkan ekspor hasil budidaya rumput laut dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- c. Mengupayakan untuk menghasilkan produk-produk rumput laut yang berkualitas dan berdaya saing tinggi melalui perbaikan teknologi budidaya dan pengolahannya.
- d. Meningkatkan peluang lapangan kerja produktif dan kesempatan berusaha dibidang budidaya rumput laut yang efisien dan menguntungkan.
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan kemandirian lembaga pembudidaya.
- f. Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengembangan usaha budidaya rumput laut di Indonesia.
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan di sekitarnya.

- h. Meningkatkan upaya perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya budidaya rumput laut.

C. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir mencakup pemanfaatan sumberdaya pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil serta jasa-jasa lingkungan dengan cara penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan (Dahuri, 2001).

Menurut Dahuri (2001), bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut, akan timbul permasalahan apabila hasil pembangunan yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan yang diharapkan. Tujuan pengelolaan yang diharapkan adalah agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, dalam arti kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan kelangsungan hidup generasi mendatang.

Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan untuk masyarakat pesisir, sangat ditentukan oleh kegiatan usaha yang dapat dikembangkan, permodalan yang dapat disediakan, serta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumberdaya pesisir dan lautan yang ada,

teknologi yang tersedia, serta kualitas sumberdaya manusia yang akan mengelolanya. Kualitas sumberdaya yang dicirikan oleh perilaku etos kerja, kondisinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tingkat pendidikan dan keinginan untuk maju. Oleh karena itu, fenomena tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka pengembangan ekonomi yang meliputi manajemen usaha, kemitraan, dan kelembagaan yang dikelola. Pengembangan kualitas manusia dan ekonomi, peran pemerintah, dan lembaga lainnya masih sangat dibutuhkan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk kebijakan pemerintah, akses permodalan, pasar, dan tata ruang wilayah pesisir (Dahuri, 2001).

Menurut Dahuri (2001) bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir tersebut, harus secara kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan yang mungkin ada. Selanjutnya dikemukakan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kelautan di Indonesia, perlu ditetapkan strategi pembangunan yang mantap dan berkesinambungan serta dapat berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

D. Budidaya Rumput Laut

Rumput laut merupakan salah satu komoditi sub-sektor perikanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena menghasilkan alginat, agar-agar dan karaginan. Alginat, agar-agar dan karaginan mempunyai tingkat kegunaan tinggi dalam berbagai bidang, seperti industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Seiring dengan berkembangnya industri tersebut, menyebabkan permintaan rumput laut terus meningkat baik untuk keperluan dalam negeri maupun ekspor.

Secara ekonomi rumput laut dapat memberikan sumbangan devisa bagi negara dan meningkatkan pendapatan nasional. Di samping itu budidaya rumput laut ternyata mampu mengubah tingkat sosial-ekonomi masyarakat pantai dan meningkatkan pendapatan serta dapat melindungi sumberdaya pesisir melalui pengalihan kegiatan yang dapat merusak lingkungan misalnya pengambilan karang dan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan (Madeali et al. 1999).

Perairan Indonesia memiliki sumberdaya plasma nutfah rumput laut kurang lebih 555 jenis (Basmal 2001). Beberapa jenis rumput laut tersebut telah mampu dikembangkan untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri. Rumput laut yang dikembangkan di Kabupaten Bantaeng adalah jenis *K.alvarezii*. Jenis ini mempunyai nilai ekonomis penting karena merupakan penghasil karaginan. Dalam dunia industri dan perdagangan, karaginan mempunyai manfaat yang sama dengan agar-agar dan alginat,

yakni digunakan sebagai bahan baku untuk industri farmasi, kosmetik, makanan dan lain-lain (Mubarak et al. 1990).

1. Deskripsi *Kappaphycus alvarezii*

Menurut Doty (1985), *K.alvarezii* merupakan salah satu jenis rumput laut merah (Rhodophyceae) dan berubah nama menjadi *K.alvarezii* karena karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa-karaginan. Maka jenis ini secara taksonomi disebut *K.alvarezii* . Nama daerah 'cottonii' umumnya lebih dikenal dan biasa dipakai dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional. Klasifikasi *K.alvarezii* menurut Doty (1985) adalah sebagai berikut :

Kelas : Rhodophyceae

Ordo : Gigartinales

Famili : Solieracea

Genus : *Eucheuma*

Species : *Kappaphycus alvarezii* (Doty)

Ciri fisik *K.alvarezii* adalah mempunyai tallus silindris, permukaan licin, cartilogeneus. Keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu atau merah. Perubahan warna sering terjadi hanya karena faktor lingkungan. Kejadian ini merupakan suatu proses adaptasi kromatik yaitu penyesuaian antara proporsi pigmen dengan berbagai kualitas pencahayaan. Duri-duri pada tallus runcing memanjang agak jarang-jarang dan tidak bersusun melingkari tallus. Percabangan ke berbagai arah dengan batang-batang utama keluar saling berdekatan ke daerah basal (pangkal). Tumbuh melekat ke substrat

dengan alat perekat berupa cakram. Cabang-cabang pertama dan kedua tumbuh dengan membentuk rumpun yang rimbun dengan ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar matahari (Atmadja et al. 1996) (Gambar 1). Rumput laut bereproduksi dengan tiga cara, yaitu: vegetatif, generatif dan pembelahan sel. Berbagai faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam proses reproduksi rumput laut seperti suhu, salinitas, cahaya, arus, dan unsur hara (Anggadireja, 2006).



Gambar 1. *Kappaphycus alvarezii*

2. Persyaratan Lokasi Budidaya

Pemilihan lokasi sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya rumput laut. Hal ini disebabkan karena produksi dan kualitas rumput laut dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologis yang meliputi kondisi substrat perairan, kualitas air, iklim, dan geografis dasar perairan, Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemudahan, risiko, serta konflik

kepentingan dengan sektor lain misalnya pariwisata, perhubungan, dan taman laut nasional (Anggadireja, 2006). Persyaratan lokasi budidaya rumput tersebut diperkuat oleh pendapat Indriani dan Sumiarsih (1999) yang menyatakan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam penentuan lokasi sebagai berikut:

- a. Lokasi budidaya rumput laut harus bebas dari pengaruh angin topan.
- b. Lokasi sebaiknya tidak mengalami fluktuasi salinitas yang besar.
- c. Lokasi budidaya yang dipilih harus mengandung makanan untuk tumbuhnya rumput laut.
- d. Perairan harus bebas dari pencemaran industri dan rumah tangga.
- e. Lokasi perairan harus berkondisi mudah menerapkan metode budidaya
- f. Lokasi budidaya harus mudah dijangkau sehingga biaya transportasi tidak terlalu besar.
- g. Lokasi budidaya harus dekat dengan sumber tenaga kerja.

Menurut Indriani dan Sumiarsih (1999), dalam pembudidayaan rumput laut jenis *Eucheuma cottonii* atau *Kappaphycus alvarezii* diperlukan beberapa persyaratan khusus dalam memilih lokasi yaitu:

- a. Letak budidaya sebaiknya jauh dari pengaruh daratan. Lokasi yang langsung menghadap laut lepas sebaiknya terdapat karang penghalang yang berfungsi melindungi tanaman dari

kerusakan akibat ombak yang kuat, juga akan menyebabkan keruhnya perairan lokasi budidaya sehingga mengganggu proses fotosintesis.

- b. Untuk memberikan kemungkinan terjadinya aerasi, pergerakan air pada lokasi budidaya harus cukup. Hal ini bertujuan agar rumput laut yang ditanam memperoleh pasokan makanan secara tetap, serta terhindar dari akumulasi debu dan tanaman penempel.
- c. Lokasi yang dipilih sebaiknya pada waktu surut masih digenangi air sedalam 30 - 60 cm. Ada dua keuntungan dari genangan air tersebut yaitu penyerapan makanan dapat berlangsung terus menerus, dan tanaman dapat terhindar dari kerusakan akibat terkena sinar matahari langsung.
- d. Perairan yang dipilih sebaiknya ditumbuhi komunitas yang terdiri dari berbagai jenis makro algae. Bila perairan tersebut telah ditumbuhi rumput laut alamiah, maka daerah tersebut cocok untuk pertumbuhannya.

3. Kelayakan Lingkungan dan Kualitas Perairan

Kelayakan lingkungan dan kualitas perairan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan rumput laut. Beberapa parameter lingkungan dan kualitas perairan yang berpengaruh antara lain:

- a. **Kondisi dasar perairan.** Menurut Anggadireja (2006) bahwa dasar perairan berupa pasir kasar yang bercampur dengan pecahan

karang merupakan substrat dasar yang cocok untuk budidaya rumput laut *Eucheuma sp.* Hal ini sejalan dengan pendapat Aslan (1998) bahwa dasar perairan yang ideal untuk budidaya rumput laut adalah perairan dengan dasarnya terdiri dari pasir kasar (*coarse sand*) yang bercampur dengan potongan-potongan karang. Lokasi seperti ini biasanya berarus sedang sehingga memungkinkan tanaman tumbuh dengan baik dan tidak mudah terancam oleh faktor-faktor lingkungan serta memudahkan pemasangan konstruksi budidaya.

b. Tingkat kecerahan air. Tingkat kecerahan perairan menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Kondisi perairan untuk budidaya *Eucheuma sp* sebaiknya relatif jernih dengan tingkat kecerahan tinggi. Tingkat kecerahan diukur menggunakan alat "*sechi-disk*" mencapai 2 - 5 m. Kondisi seperti ini dibutuhkan agar cahaya matahari dapat mencapai tanaman untuk proses fotosintesis (Anggadireja, 2006).

c. Salinitas dan suhu air. Perairan untuk lokasi budidaya sebaiknya berjauhan dengan sumber air tawar untuk menghindari penurunan salinitas secara drastis. Menurut Anggadireja (2006) salinitas yang ideal untuk budidaya rumput laut adalah 28 - 33 ‰, sedangkan Aslan (1998) mengemukakan hal berbeda bahwa salinitas yang ideal untuk budidaya rumput laut adalah 30 - 37 ‰.

Suhu berpengaruh langsung terhadap rumput laut dalam proses fotosintesis, proses metabolisme, dan siklus reproduksi (Rani, dkk, 2009).

Menurut Anggadireja (2006) bahwa suhu yang optimal untuk budidaya rumput laut adalah 26 - 30°C, sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Aslan (1998) bahwa suhu yang ideal adalah 26 - 33 °C.

d. Pergerakan air (gelombang dan arus). Lokasi untuk budidaya rumput laut harus terlindung dari hempasan gelombang dan arus yang terlalu kuat. Apabila hal ini terjadi, gelombang dan arus akan merusak dan menghanyutkan tanaman. Menurut Anggadireja (2006) kecepatan arus yang baik untuk budidaya rumput laut berkisar 0,2 - 0,4 m/detik.

e. Pencemaran. Bahan pencemar yang mungkin berasal dari buangan industri, rumah tangga, dan tumpahan minyak (tabrakan kapal tanker, pengeboran minyak, dan aktivitas nelayan) harus dihindari karena dapat merusak dan mengganggu tanaman yang dipelihara (Aslan, 1998). Hal ini sejalan dengan pendapat Anggadireja (2006) bahwa lokasi yang berdekatan dengan sumber pencemaran seperti industri dan tempat bersandarnya kapal sebaiknya dihindari sebagai lokasi budidaya rumput laut.

f. Bukan jalur pelayaran dan memperoleh izin dari pemerintah. Untuk keamanan dan keberlanjutan budidaya maka lokasi yang dipilih bukan merupakan jalur pelayaran yang ramai dan tidak dipakai sebagai tempat penyeberangan sehari-hari (Aslan, 1998 dan Anggadireja, 2006). Selain itu, kegiatan budidaya rumput laut harus mendapat izin dari pemerintah setempat sehingga tidak terjadi hambatan dan konflik kepentingan dengan berbagai pihak.

3. Tahapan Budidaya Rumput Laut

a. Penyediaan bibit. Menurut Aslan (1998), ciri-ciri bibit rumput laut yang baik adalah (1) bila dipegang terasa elastis, (2) mempunyai cabang yang banyak dengan ujungnya yang berwarna kuning kemerah-merahan, (3) mempunyai batang yang tebal dan berat, dan (4) bebas dari tanaman lain atau benda-benda asing.

Menurut Aslan (1998), hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan bibit rumput laut adalah:

- 1) Bila jaraknya dekat dengan lokasi budidaya, maka bibit dapat diangkut dengan sampan namun harus ditutup dengan terpal
- 2) Biarkan bibit selalu basah dengan menyiramnya dengan air laut,
- 3) Jangan biarkan bibit terkena air hujan
- 4) Jika bibit tidak langsung ditanam sebaiknya disimpan dalam kandang bibit (*seed bin*) yang telah disiapkan

b. Penanaman bibit. Bibit yang akan ditanam adalah *thallus* yang masih muda dan berasal dari ujung *thallus* tersebut. Saat yang baik untuk pengikatan atau penanaman bibit adalah pada saat cuaca teduh atau pada pagi dan sore hari menjelang malam. Menurut Anggadireja (2006) tahapan penanaman bibit terdiri dari:

- 1) Pengikatan bibit pada tali ris dengan jarak 25 cm setiap rumpun dengan panjang tali ris 50 – 75 m yang direntangkan pada tali utama
- 2) Pengikatan tali jangkar pada tali utama

3) Pengikatan pelampung dari botol *polietilen* (500 ml) pada tali ris

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Aslan (1998) bahwa jarak tanam bibit rumput laut adalah 20 cm.

c. Pemeliharaan. Kegiatan yang dilakukan selama pemeliharaan rumput laut adalah membersihkan lumpur dan kotoran, menyulam tanaman yang rusak, mengganti tali, patok, bambu, dan pelampung yang rusak. Lumpur akan melekat pada tanaman bila pergerakan air kurang. Dalam kondisi demikian maka perlu dilakukan pemeliharaan yang sungguh-sungguh yaitu menggoyang-goyang tali ris untuk menghindari lumpur dan kotoran menempel pada rumput laut. Selain itu, perlu dilakukan penyulaman bila ada tanaman yang rusak agar jumlah tanaman pada setiap tali ris tidak berkurang (Anggadireja, 2006).

d. Panen dan pascapanen. Menurut Saleh (1991), pemanenan rumput laut dilakukan setelah tanaman berumur 45 hari, sedangkan menurut Aslan (1998), bahwa rumput laut sudah dapat dipanen setelah berumur 1,5 - 4 bulan dengan cara melepas tali yang berisi rumput laut. Teknik panen yang dilakukan oleh pembudidaya adalah panen keseluruhan (*full harvest*) karena lebih praktis dan lebih cepat dibandingkan dengan teknik memetik (Anggadireja, 2006).

Kualitas rumput laut dipengaruhi oleh teknik budidaya, umur panen, dan penanganan pascapanen. Menurut Anggadireja (2006), penanganan pascapanen meliputi kegiatan:

1) Pencucian,

- 2) Pengeringan/penjemuran sampai mencapai kadar air 14 - 18 %,
- 3) Pembersihan kotoran/garam untuk mendapatkan rumput laut yang berkualitas yaitu total garam dan kotoran tidak lebih dari 3 - 5 %,
- 4) Pengepakan,
- 5) Pengangkutan, dan
- 6) Penyimpanan/penggudangan.

E. Konsep Revolusi Biru

Mengingat besarnya potensi kelautan dan perikanan dan menyadari bahwa potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengatasi permasalahan yang telah begitu lama membelit sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu diperlukan Revolusi Biru, yaitu perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan Minapolitan yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas (Kepmen Pedum Minapolitan, 2011).

Revolusi Biru mempunyai 4 pilar, yaitu 1) Perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim, 2) Pembangunan berkelanjutan, 3) Peningkatan produksi kelautan dan perikanan, dan 4) Peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas. Perubahan asumsi-asumsi dasar pembangunan yang selama ini lebih banyak

didasarkan pada kerangka pemikiran daratan menjadi kepulauan makin diperlukan untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih berimbang. Perimbangan tersebut diperlukan selain untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perairan/laut yang begitu besar, juga mengurangi tekanan pada sumberdaya alam daratan. Reorientasi konsep pembangunan tersebut diperlukan untuk memberikan arah pembangunan sesuai dengan potensi yang ada dan tuntutan masa depan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Pada saat yang bersamaan, Revolusi Biru diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bangsa, bahwa sumberdaya perairan nasional memerlukan sistem pengelolaan yang seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian, karena ia rentan terhadap kerusakan. Pembangunan yang lebih berorientasi ke darat dapat mengesampingkan potensi kerusakan di lingkungan perairan, sedangkan banyak sekali kasus kerusakan sumberdaya alam di darat berakibat fatal pula di wilayah perairan, terutama pesisir dan laut. Kesadaran tersebut diperlukan untuk memberikan landasan kuat bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan peluang pemanfaatan sumberdaya perairan bagi kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, baik untuk generasi masa kini maupun bagi masa yang akan datang.

Revolusi Biru akan memberikan peluang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan inovasi dan terobosan, yaitu melalui percepatan peningkatan produksi, baik penangkapan ikan maupun

perikanan budidaya. Produksi sumberdaya kelautan dan perikanan harus ditingkatkan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan tangkap yang begitu besar tidak hanya di perairan teritorial dan ZEEI tetapi di perairan laut lepas dan perairan ZEE negara lain di dunia. Sementara itu, dengan gerakan peningkatan produksi perikanan budidaya diharapkan potensi perairan air tawar, payau dan laut yang begitu besar dapat dimanfaatkan menjadi lahan-lahan produktif dengan teknologi inovatif dengan tingkat produksi tinggi (Kepmen Pedum Minapolitan, 2011).

Perubahan orientasi kebijakan dari darat ke perairan diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan pengalokasian sumberdaya pembangunan yang seimbang sesuai dengan karakteristik Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya sumberdaya perairan. Di lain pihak, kesadaran bagi masyarakat mengenai perlunya reorientasi pandangan ini diharapkan mampu mendorong minat dan upaya mengembangkan ekonomi berbasis perairan, sehingga akan lebih banyak lagi investasi di bidang sumberdaya perairan.

F. Konsep Minapolitan

Pada tingkat implementasi, Revolusi Biru akan dilaksanakan melalui sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep Minapolitan. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang pada umumnya berada di pedesaan lambat berkembang karena kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya

manusia juga relatif rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia di perkotaan. Kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di perkotaan (Kepmen Pedum Minapolitan, 2011).

Dengan konsep Minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan-kemudahan atau peluang yang biasanya ada di perkotaan perlu dikembangkan di pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra produksi. Sebagai sentra produksi, pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu, 1) Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan 2) Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Konsep Minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu 1) demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, 2) keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan 3) penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat – bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan

sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

1. Pengertian Umum

Secara bahasa, minapolitan berasal dari kata “Mina” (perikanan) dan “politan” (poli (multi) dan –tan (kegiatan)) yang dapat diartikan sebagai kluster kegiatan perikanan yang meliputi kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran dalam sistem agribisnis terpadu di suatu wilayah atau lintas wilayah perikanan dengan kelengkapan sarana prasarana serta pelayanan seperti di perkotaan (kelembagaan, sistem permodalan, transportasi, dan lain-lain). Lengkapnya adalah kluster perikanan yang tumbuh dan berkembang seiring berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan perikanan di wilayah tersebut dan sekitarnya.

Adapun secara makna, ada beberapa definisi minapolitan, yaitu :

1. Kawasan perdesaan yang disiapkan mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dan pelayanan perkotaan (infrastruktur termasuk transportasi dan energi), dengan dukungan sistem permodalan yang tepat guna.
2. Kawasan yang dikembangkan melalui pembentukan titik tumbuh suatu kluster kegiatan perikanan dengan sistem agribisnis berkelanjutan yang meliputi produksi, pengolahan dan pemasaran, sampai jasa lingkungan sebagai sistem kemitraan di dalam satu wilayah.

3. Kawasan terintegrasi sebagai kluster kegiatan perikanan dimana masyarakatnya tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan kelembagaan usaha yang didukung sumberdaya manusia berkualitas melalui pendidikan yang maju.

2. Kriteria Kawasan Minapolitan

Program minapolitan ini pada prinsipnya merupakan suatu program kegiatan yang berupaya untuk mensinergiskan kegiatan produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran dalam satu rangkaian kegiatan besar dalam satu kawasan atau wilayah.

Kriteria dan persyaratan kawasan minapolitan yang akan dikembangkan, disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kawasan yang akan dikembangkan. Kriteria umum pengembangan kawasan minapolitan harus memenuhi kriteria di bawah ini, yaitu :

- a. Penggunaan lahan untuk kegiatan perikanan harus memanfaatkan potensi yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup serta mencegah kerusakannya;
- b. Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang untuk dialih fungsikan;
- c. Kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian Amdal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

- d. Kegiatan perikanan skala besar, harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat; dan
- e. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan dan RTRW.

Sedangkan Kriteria khusus pengembangan kawasan perikanan budidaya antara lain adalah:

- a. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah;
- b. Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan itu sendiri maupun di kawasan sekitarnya;
- c. Memiliki keterkaitan kedepan (daerah pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun ke belakang (suplai kebutuhan sarana produksi) dengan beberapa daerah pendukung;
- d. Memiliki kemampuan untuk memelihara sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
- e. Memiliki luasan areal budidaya eksisting minimal 200 Ha.

3. Persyaratan Kawasan Minapolitan

Suatu kawasan dapat dikembangkan menjadi kawasan minapolitan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki sumberdaya lahan/perairan yang sesuai untuk pengembangan komoditas perikanan yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (komoditas unggulan), serta berpotensi atau telah berkembang diversifikasi usaha komoditas unggulannya. Pengembangan kawasan tersebut tidak hanya menyangkut kegiatan perikanan saja (on farm) tetapi juga kegiatan off farm-nya, yaitu mulai dari pengadaan sarana dan prasarana perikanan, kegiatan pengolahan hasil perikanan sampai dengan pemasaran hasil perikanan serta kegiatan penunjang.
- b. Memiliki berbagai sarana dan prasarana minabisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha minabisnis tersebut adalah :
 - 1) Pasar, (pasar hasil-hasil perikanan, pasar sarana dan prasarana, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang, *cold storagge* dan *processing* hasil perikanan sebelum dipasarkan.
 - 2) Lembaga keuangan (perbankan maupun non perbankan).
 - 3) Memiliki kelembagaan perikanan (kelompok)
 - 4) Balai Benih.
 - 5) Penyuluhan dan bimbingan teknologi.
- c. Memiliki sarana dan Prasaran penunjang yanga memadai seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain-lain.

- d. Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan dan lain-lain.
- e. Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian sumberdaya alam, sosial budaya maupun kota terjamin.

Dengan konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi.

1. Prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders, baik instansi sektoral, pemerintahan pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik.
2. Prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya pun diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong

agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif.

3. Prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif.
4. Prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan market share produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.

4. Komoditi Unggulan Kawasan Minapolitan

Komoditi unggulan adalah produk pilihan yang dihasilkan oleh sektor perikanan atau pariwisata berbasis perikanan yang mempunyai nilai jual dan jaminan prospek masa depan karena memiliki daya saling (*competitive advantages*) yang tinggi. Kawasan minapolitan tidak saja berfungsi sebagai pemasok komoditi unggulan yang dihasilkan, tetapi juga menghasilkan suatu produk olahan dari produksi pertanian yang siap dipasarkan dan menjadi ciri khas daerah yang bersangkutan. Keunggulan

produk yang dihasilkan dari industri yang mengolah komoditi unggulan tersebut akan memberikan nilai tambah yang besar karena produk yang dihasilkan mempunyai nilai jual yang stabil dibandingkan dengan produk perkebunan atau pertanian tanpa melalui pengolahan.

Untuk mendapatkan model-model pengembangan minapolitan pada kawasan pertanian yang berbasis: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan maka diperlukan susunan tipologi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing kawasan minapolitan.

Di daerah-daerah yang akan dikembangkan sebagai kawasan minapolitan, membangun industri produk jadi yang berbasis pada komoditi unggulan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar produk tersebut tidak menjadi komoditi yang dipermainkan pasar. Dengan demikian selain petani akan mendapatkan jaminan pembelian bagi produk pertanian yang dihasilkan, harga jual produk pertanian juga akan memberikan kontribusi yang baik kepada petani. Akan terjadi kerjasama yang baik antara petani dengan industri, di mana petani akan mengembangkan tanaman atau komoditi yang dibutuhkan oleh industri; sedangkan industri akan mendapatkan jaminan suplai dari para petani pengembang komoditi yang dibutuhkan.

Selanjutnya, konsep minapolitan akan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan di daerah-daerah potensial unggulan. Kawasan-kawasan minapolitan akan dikembangkan melalui

pembinaan sentra produksi yang berbasis pada sumberdaya kelautan dan perikanan. Setiap kawasan minapolitan beroperasi beberapa sentra produksi berskala ekonomi relatif besar, baik tingkat produksinya maupun tenaga kerja yang terlibat dengan jenis komoditas unggulan tertentu. Dengan pendekatan sentra produksi, sumberdaya pembangunan, baik sarana produksi, anggaran, permodalan, maupun prasarana dapat dikonsentrasikan di lokasi-lokasi potensial, sehingga peningkatan produksi kelautan dan perikanan dapat dipacu lebih cepat (Kepmen Pedum Minapolitan, 2011).

Agar kawasan minapolitan dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi yang sehat, maka diperlukan keanekaragaman kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi dan perdagangan lainnya yang saling mendukung. Keanekaragaman kegiatan produksi dan usaha di kawasan minapolitan akan memberikan dampak positif (*multiplier effect*) bagi perkembangan perekonomian setempat dan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

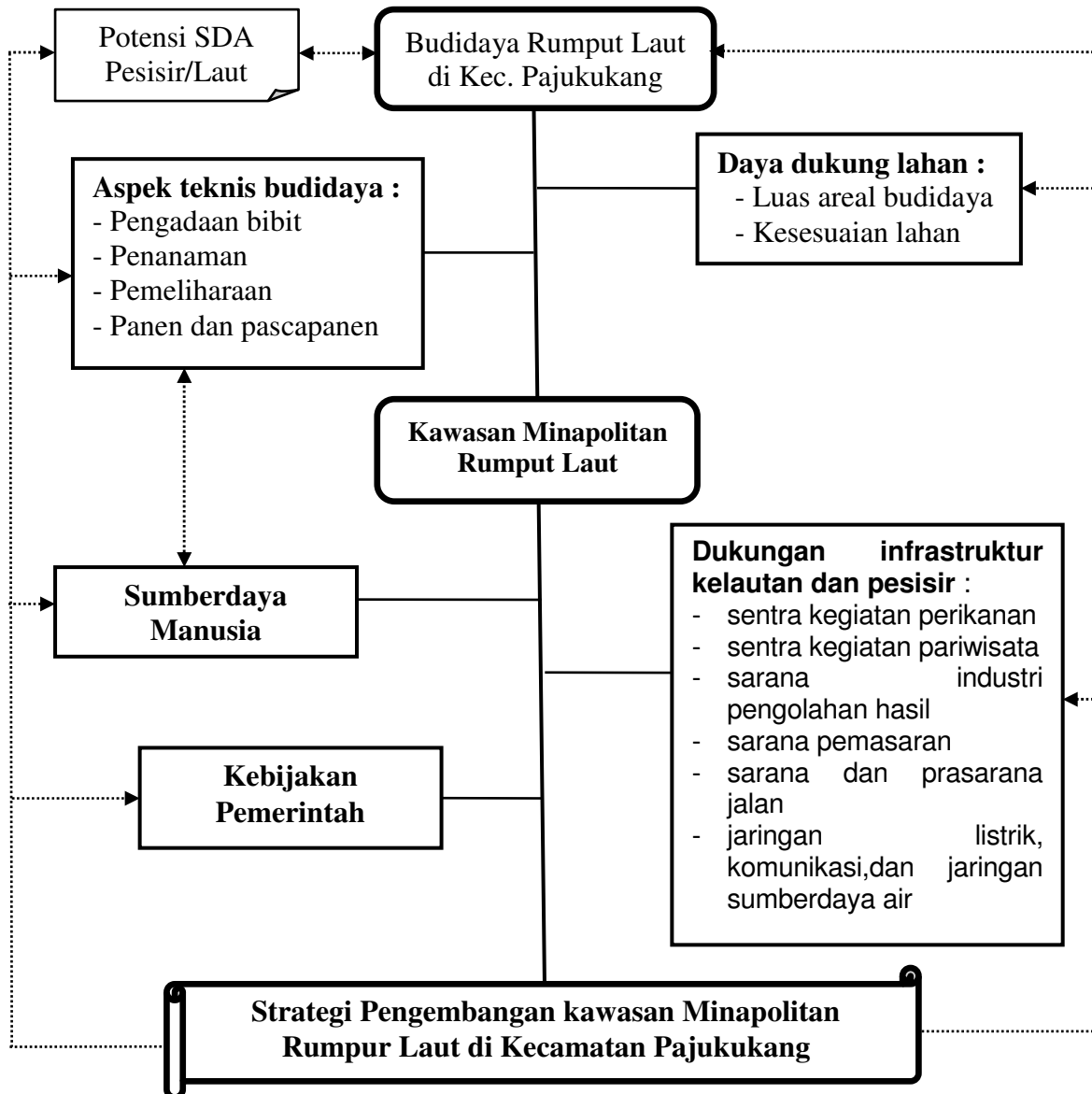
Dengan pendekatan kawasan dan sentra produksi, diharapkan pembinaan unit-unit produksi dan usaha dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Walaupun demikian, pembinaan unit-unit produksi di luar kawasan harus tetap dilaksanakan sebagaimana yang selama ini dijalankan, namun dengan konsep minapolitan pembinaan unit-unit produksi di masa depan dapat diarahkan dengan menggunakan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi.

G. Kerangka Pikir

Potensi Budidaya rumput laut yang dapat dikembangkan sebagai basis kegiatan perikanan dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Pajukukang sangat besar. Budidaya rumput laut mulai digeluti pada tahun 1987 dan masih diminati sampai sekarang, bahkan dalam perkembangan terakhir telah menjadi primadona bagi aktivitas mata pencaharian masyarakat pesisir di Kecamatan Pajukukang. Fenomena ini tertampilkan melalui banyaknya nelayan tangkap yang beralih menjadi petani rumput laut bahkan menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Dengan alasan yang sederhana bahwa budidaya rumput laut memiliki masa tanam yang pendek dan memiliki nilai jual yang tinggi. Hal tersebut menimbulkan suatu kekhawatiran bahwa pada saat kelak kegiatan rumput laut menunjukkan tingkat kejenuhannya, akan cukup menyulitkan bagi warga nelayan yang telah meninggalkan aktivitasnya.

Penelitian ini mengkaji bagaimana faktor – faktor pendukung dalam pengembangan minapolitan rumput laut baik dari aspek sumberdaya manusia, daya dukung lahan, aspek teknis budidaya, infrastruktur kelautan dan pesisir serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya faktor-faktor pendukung tersebut di ukur kontribusi dan peranannya dalam pengembangan kawasan minapolitan rumput laut di Kecamatan Pajukukang.

Strategi pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditi utama rumput laut selanjutnya dikaji melalui pendekatan analisis *SWOT* yaitu analisis kualitatif untuk mengidentifikasi berbagai faktor utama yang berpengaruh secara sistematis yang didasarkan pada logika memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), serta meminimalisir kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Strategi kebijakan yang diciptakan diharapkan dapat menjadikan kawasan minapolitan dengan komoditi utama rumput laut dapat di terapkan dan berkembang serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya rumput laut dan masyarakat pesisir pada umumnya. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Rumpur Laut di Kecamatan Pajukukang.